

REALISASI DANA ALOKASI UMUM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH RIAU PERIODE 2018-2021

Ayu Waningsih *¹

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka,
Indonesia
ayuwaningsih626@gmail.com

Artilka Rahma Sari

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka,
Indonesia

Abstract

Economic growth at the regional level is a complex phenomenon influenced by various factors. The General Allocation Fund (DAU) has a central role in supporting economic development in Riau Province, which is rich in natural resources, especially oil and gas. This research aims to reveal the realization of Riau Province's DAU for the 2018-2021 period and analyze its influence on regional economic growth. The research method uses a quantitative approach with secondary data from the Riau Central Statistics Agency (BPS). Descriptive analysis, classical assumption test, t-test, and simple linear regression were used to analyze the data. The research results show that DAU realization experienced a significant decline during this period. In 2021, there will be a decrease in allocations, possibly due to the impact of the pandemic and changes in national policy. However, the results of the hypothesis test show that DAU does not have a significant effect on the economic growth of Riau Province. The conclusion of this research is that the effectiveness of DAU management needs to be re-evaluated. Although DAU provides substantial financial support, new strategies for using these funds need to be considered to achieve more optimal economic growth. These findings can be the basis for improving policies at the regional level to increase the contribution of DAU to the economic development of Riau Province.

Keywords: General Allocation Fund, economic growth, Riau.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Riau, yang memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi DAU Provinsi Riau periode 2018-2021 dan menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder yang bersemesta dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. Analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji-t, dan regresi linier sederhana menjadi alat analisis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi DAU mengalami fluktuasi signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2021, terjadi penurunan alokasi, kemungkinan akibat dampak pandemi dan perubahan kebijakan nasional.

¹ Korespondensi Penulis

Namun, hasil uji hipotesis menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan DAU perlu dievaluasi ulang. Meskipun DAU memberikan dukungan finansial yang substansial, strategi baru dalam penggunaan dana tersebut perlu dipertimbangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di tingkat daerah guna meningkatkan kontribusi DAU terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Riau.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, pertumbuhan ekonomi, Riau.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah fenomena yang kompleks dan multifaset, tercermin dari dinamika beragam sektor ekonomi yang saling terkait dan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Menurut Parengkuhan dkk (2022) “Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi daerah mencakup peningkatan dalam produksi barang dan jasa, yang dapat diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)” (p.63). Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi daerah menjadi indikator vital bagi kesejahteraan masyarakat, karena dapat mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan perbaikan kualitas hidup. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah melibatkan aspek-aspek seperti investasi, infrastruktur, kebijakan fiskal dan moneter, sumber daya manusia, serta kondisi eksternal seperti kondisi perekonomian global dan ketidakpastian politik (Sigalingging dan Rijal, 2023).

Investasi memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi tidak hanya mencakup investasi swasta dalam bentuk modal fisik, tetapi juga investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas dan produktivitas (Djadjuli, 2018). Selain itu, peran pemerintah daerah sangat penting melalui kebijakan fiskal yang bijak, regulasi yang mendukung bisnis, serta prencanaan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi dan teknologi informasi, menjadi katalisator penting dalam membuka peluang-peluang baru bagi sektor-sektor ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing daerah (Nurkholis dan Khusaini, 2019).

Sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi komponen kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendidikan dan pelatihan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan SDM sebagai investasi jangka panjang yang nantinya dapat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi (Fitra, 2019).

Dalam menghadapi tantangan global, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan dinamika perdagangan internasional. Keterkaitan antara ekonomi daerah dengan pasar global memerlukan kebijakan yang

cerdas dan strategi diversifikasi untuk mengurangi risiko eksternal (Parengkuan, 2022). Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, kewirausahaan, dan investasi yang dapat menggerakkan roda ekonomi daerah. Seiring dengan itu, perencanaan pembangunan yang terarah, pelaksanaan kebijakan yang efektif, dan evaluasi berkala menjadi landasan untuk mengukur dan memperbaiki kinerja pertumbuhan ekonomi daerah (Alhusain dkk, 2018).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencerminkan perubahan paradigma signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini, daerah mendapatkan wewenang yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan menjalankan kepengurusan pada daerah masing-masing dengan sejumlah kecil keterlibatan dari pemerintah pusat. Dengan pemberian otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi setiap daerah menjadi aspek yang berpengaruh penting dalam dinamika pembangunan ekonomi nasional (Amin, 2019).

Pemberian hak serta kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah menciptakan ruang bagi inovasi dan adaptasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan anggaran keuangan daerah sendiri dan mengimplementasikan regulasi yang berorientasi pada perkembangan aerahnya secara organik akan bermanfaat pada perkembangan daerah dan pertumbuhan ekonominya (Fauzi, 2019).

Pemberdayaan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan ekonomi sendiri membuka pintu lebar-lebar bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara baik, pemerintah daerah dapat membangun pola kemitraan yang kuat dengan masyarakat setempat. Kolaborasi ini menciptakan peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal (Saputra dan Pandoyo, 2020).

Pertumbuhan ekonomi yang diupayakan oleh pemerintah daerah sebagai respons terhadap pemberian otonomi tidak hanya mencakup peningkatan produktivitas, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Ini membawa konsekuensi positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan akses lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seiring dengan itu, pembangunan ekonomi di tingkat daerah menjadi faktor utama dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Iqbal dkk (2020) “Dana Alokasi Umum (DAU) daerah menjadi salah satu bagian penting pada sistem keuangan negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat local” (p.3). DAU

diperoleh dari alokasi anggaran pusat dan didistribusikan untuk pemerintah daerah untuk mendanai berbagai keperluan masing-masing daerah, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar. Keberadaan DAU diatur oleh berbagai perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAU berperan penting bagi mendukung otonomi daerah, memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam merumuskan keuangan mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Seiring dengan konsep desentralisasi, DAU diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan memberikan ruang untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika lokal. Penentuan besaran DAU tidaklah statis dan melibatkan berbagai faktor, termasuk populasi, indeks pembangunan manusia, dan capaian kinerja pemerintah daerah (Trianto dan Panggabean, 2023). Hal ini bertujuan untuk memberikan alokasi yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. DAU juga menjadi instrumen untuk mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah, sehingga daerah yang memiliki potensi ekonomi yang lebih rendah tetap mendapatkan dukungan yang memadai.

Penggunaan DAU oleh pemerintah daerah diarahkan pada sejumlah sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemilihan prioritas ini besar harapan akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, tantangan muncul terkait dengan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan DAU, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi yang cermat. Seiring dengan perkembangan zaman, peran DAU semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Ketersediaan dana yang memadai melalui DAU menjadi kunci keberhasilan implementasi berbagai program dan proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Afandi dan Afandi, 2018).

Provinsi Riau sebagai salah satu entitas geografis di Indonesia, memegang peranan penting dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, Riau memiliki potensi pendapatan asli daerah yang signifikan. Kehadiran industri minyak dan gas di provinsi ini menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan pendapatan daerah. Namun, sumber daya alam yang melimpah juga membawa tantangan tersendiri, termasuk dalam pengelolaannya agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.

Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Riau sangat erat kaitannya dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat. DAU menjadi salah satu instrumen keuangan yang memberikan dukungan signifikan bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan ekonomi di tingkat lokal. DAU memungkinkan pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan investasi strategis di berbagai sektor ekonomi. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya dapat diperkuat melalui alokasi dana yang tepat dan efisien. Penggunaan DAU

yang bijak dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, menghasilkan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi (Elizabeth dan Anugrah, 2020).

Salah satu aspek kritis dalam pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau adalah kemampuannya untuk mengerakkan sektor-sektor ekonomi non-migas. Diversifikasi ekonomi menjadi suatu keharusan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam tertentu, seperti minyak dan gas. DAU memberikan peluang untuk mengembangkan sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri manufaktur sebagai alternatif yang berpotensi tinggi. Selain itu, DAU juga dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Riau. Alokasi dana yang merata dapat membantu daerah-daerah yang mungkin memiliki potensi ekonomi yang lebih rendah untuk terus berkembang dan menyusul daerah-daerah yang lebih maju. Ini menciptakan kondisi di mana setiap daerah di Riau dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

Namun, untuk memastikan bahwa DAU memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Realisasi Dana Alokasi Umum Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Riau Periode 2018-2021”** yang bertujuan untuk melihat realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) provinsi Riau periode 2018-2022 dan untuk melihat seberapa besar pengaruh DAU bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif sebagai pendekatan utamanya dengan fokus pada realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau selama periode 2018-2021. Metode kuantitatif dipilih karena memberikan kerangka analisis yang kuat didalam melihat antar factor-faktor yang menjadi focus penelitian secara numerik. Data didalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi pihak lain (data skunder), termasuk buku, catatan, dan laporan historis yang terkait dengan pokok bahasan. Sumber data utama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, dengan fokus pada jumlah Dana Alokasi Umum dan data pertumbuhan ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan melalui akses ke arsip perpustakaan BPS Riau, yang mencakup data dokumen baik yang telah dipublikasikan maupun data yang belum dipublikasikan. Terdapat juga data yang mendukung penelitian ini juga diakses melalui situs web Badan Pusat Statistik serta Kajian Ekonomi Regional WEB dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terbitan tahun 2018-2021.

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai pendekatan analisis deskriptif dalam memberikan gambaran rinci tentang variabel diteliti. Uji asumsi klasik, khususnya uji normalitas, digunakan untuk melihat persebaran data yang diuji sudah tersebar dengan normal atau tidak. Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini antara lain uji-t, yang bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh antara Dana Alokasi Umum

dan pertumbuhan ekonomi daerah Riau. Selain itu penelitian ini juga melibatkan uji regresi linier sederhana untuk mendalami pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau selama periode 2018-2021. Hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H_0 : Tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi yang signifikan Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_1 : Terdapat hubungan saling mempengaruhi yang signifikan Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Hasil temuan dari pengujian normalitas, didapat informasi berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		16
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,88679260
Most Extreme Differences	Absolute	,183
	Positive	,183
	Negative	-,118
Test Statistic		,183
Asymp. Sig. (2-tailed)		,156 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber data : olah data SPSS, 2023

Tabel 1 hasil uji normalitas yang mempergunakan uji Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa nilai asymp. signifikansi sebesar 0,156. Nilai ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang umumnya sebesar 0,05. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa distribusi residual dari data yang diuji dapat dianggap normal dikarenakan nilai asymp. signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Sederhana

Hasil temuan dari pengujian regresi linear berganda, didapat informasi berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,883	1	,883	1,048	,323 ^b
	Residual	11,796	14	,843		
	Total	12,679	15			
a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI						
b. Predictors: (Constant), DAU						

Sumber data: olah data SPSS, 2023

Dari hasil uji regresi linier sederhana pada Tabel 2, diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + bx$$

$$Y = 0,883 + 11,789X$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat dikatakan bahwa:

- Nilai konstanta (α) sebesar 0,883 menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan tanda positif ini, dapat diinterpretasikan bahwa jika nilai variabel independen (X) sama dengan 0, maka nilai rata-rata dari variabel dependen Y akan menjadi 0,883. Artinya, adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.
- Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (X) memiliki nilai positif sebesar 11,789. Artinya, jika Dana Alokasi Umum (X) mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sekitar 11,789, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap tetap. Tanda positif pada koefisien ini menunjukkan adanya pengaruh searah antara variabel DAU dan variabel Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan bahwa peningkatan DAU berkontribusi positif terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Uji-t

Dari uji-t yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil analisis Uji-t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	5,446	,000
	DAU	-1,024	,323

Sumber data: olah data SPSS, 2023

Tabel 3 terlihat bahwa nilai t hitung pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan t-value sebesar -1,024 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,323. Pada tingkat signifikansi 0,05, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,323 > 0,05$) menunjukkan bahwa variabel DAU tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya Dana Alokasi Umum (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Riau

Sebagai sumber pendanaan utama yang diterima dari pemerintah pusat, DAU memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan provinsi. Provinsi Riau, yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, termasuk minyak dan gas, menjadikan DAU sebagai bagian integral dalam strategi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakatnya. Berikut, realisasi Dana alokasi umum provinsi Riau kuartil I-IV periode 2018-2021.

Tabel 4 Realisasi Dana Alokasi Umum Riau 2018-2021

Tahun	Dana Alokasi Umum (Miliar Rupiah)
2018(1)	2,792
2018(2)	4,903
2018(3)	7,015
2018(4)	8,417
2019(1)	2,963
2019(2)	5,236
2019(3)	7,471
2019(4)	8,952
2020(1)	2,960
2020(2)	5,052
2020(3)	7,096
2020(4)	8,406
2021(1)	2,119
2021(2)	4,457
2021(3)	6,634
2021(4)	8,404

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Realisasi Alokasi Dana Umum (DAU) di Provinsi Riau pada periode 2018-2021 mencerminkan pola penyaluran dana yang signifikan dari pemerintah pusat ke tingkat provinsi. Pada tahun 2018, DAU dimulai dengan alokasi sekitar 2,792 miliar pada kuartal pertama dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 8,417 miliar pada kuartal keempat. Peningkatan yang signifikan ini dapat mencerminkan adanya kebijakan nasional yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah pada saat itu. Tren peningkatan DAU berlanjut pada tahun 2019, dimulai dari 2,963 miliar pada kuartal

pertama dan mencapai 8,952 miliar pada kuartal keempat. Angka-angka ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan finansial yang substansial kepada Provinsi Riau.

Pada tahun 2020, alokasi DAU terus meningkat dari 2,960 miliar pada kuartal pertama menjadi 8,406 miliar pada kuartal keempat. Namun, pada tahun 2021, terlihat adanya penurunan, dimulai dari 2,119 pada kuartal pertama hingga 8,404 pada kuartal keempat. Pola fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah. Penurunan alokasi pada tahun 2021 dapat dihubungkan dengan berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19, ketidakpastian ekonomi global, atau perubahan kebijakan nasional terkait alokasi dana bagi daerah. Dengan demikian, data realisasi DAU memberikan gambaran tentang sejauh mana Provinsi Riau telah memanfaatkan dukungan finansial dari pemerintah pusat dan sejauh mana keberlanjutan dan efektivitas pemanfaatan dana tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi aspek kritis dalam konteks kebijakan pembangunan. Menurut pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk mendukung pengaruh signifikan dari Dana Alokasi Umum bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah Riau.

Tabel hasil analisis menunjukkan besarnya nilai t hitung pada variabel DAU sebesar -1,024 dimana nilainya signifikansinya (Sig.) sebesar 0,323. Besaran signifikansi yang lebih besar dari nilai signifikansi yang umumnya ditetapkan (0,05) mengindikasikan variabel DAU tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks penelitian ini.

Interpretasi dari hasil ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas pengelolaan DAU, strategi alokasi dana, dan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hubungan antara DAU dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun hasil ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi yang ditetapkan, variabel DAU tidak berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penelitian lebih lanjut dapat merinci aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi dinamika tersebut.

Adanya ketidaksignifikan ini juga dapat menjadi landasan bagi pemikiran kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah, berdasarkan temuan ini, dapat mengkaji kembali strategi penggunaan DAU, mengevaluasi program-program yang didanai oleh dana tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang perlu diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, hasil uji hipotesis ini bukan hanya merupakan temuan statistik semata, tetapi juga menjadi panduan penting dalam perumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Temuan ini berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Uhise (2013) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dana alokasi umum secara langsung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan dana alokasi umum akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan temuan ini dibandingkan penelitian terdahulu kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan dalam periode penelitian, yaitu 2018-2021 pada penelitian ini, sedangkan penelitian sebelumnya 2007-2012. Kedua, variasi dalam metode penelitian dan pemilihan variabel kontrol dapat menyebabkan perbedaan hasil antara kedua penelitian. Selain itu, fokus penelitian Uhise (2013) pada hubungan antara DAU, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara menyoroti perbedaan kontekstual antarprovinsi yang dapat memengaruhi temuan. Oleh karena itu, perbedaan ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara DAU dan pertumbuhan ekonomi, serta pentingnya mempertimbangkan variabel intervening dalam konteks geografis dan waktu yang berbeda.

SIMPULAN

Berdasarkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Riau pada periode 2018-2021, terlihat pola penyaluran dana yang signifikan dari pemerintah pusat. Meskipun terjadi fluktuasi, peningkatan alokasi pada awal periode mencerminkan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Namun, penurunan alokasi pada tahun 2021, disebabkan mungkin oleh dampak pandemi dan perubahan kebijakan nasional, menunjukkan dinamika yang perlu dicermati.

Sementara itu, pengaruh DAU bagi pertumbuhan ekonomi menurut pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel DAU tidak terdapat pengaruh signifikan. Nilai yang lebih tinggi pada signifikansi dibandingkan tingkat yang ditetapkan menunjukkan bahwa DAU tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa efektivitas pengelolaan DAU perlu dievaluasi, dan perlu dipertimbangkan strategi baru dalam penggunaan dana tersebut agar dalam pelaksanaanya pertumbuhan ekonomi yang optimal dapat dicapai. Kesimpulan ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di tingkat daerah guna meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Umum dalam mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Riau.

Keterbatasan penelitian ini mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan waktu dalam penelitian periode 2018-2021 dapat mengurangi kemampuan untuk mengevaluasi dinamika jangka panjang atau perubahan struktural. Kedua, faktor eksternal seperti dampak pandemi dan perubahan kebijakan nasional dibahas secara umum, tetapi penelitian tidak menyelidiki dengan rinci bagaimana faktor-faktor ini secara spesifik memengaruhi alokasi dana dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, keterbatasan dalam pengendalian variabel lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi bisa mereduksi keabsahan temuan. Terakhir, keterbatasan data, seperti keterbatasan data ekonomi Provinsi Riau, dapat membatasi ketepatan analisis. Oleh

karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis faktor eksternal, menggunakan variabel kontrol yang lebih lengkap, melakukan studi komparatif, mengembangkan model yang lebih kompleks, dan mengeksplorasi dampak jangka panjang dari alokasi DAU untuk meningkatkan pemahaman dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Tunas Gemilang.
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2018). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di pemerintah daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.
- Elizabeth, R., & Anugrah, I. S. (2020). Pertanian bioindustri meningkatkan daya saing produk agroindustri dan pembangunan pertanian berkelanjutan. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 871.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Fitra, H. (2019). *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. Irdh.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 1-13.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Nurkholis, M., & Khusaini. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Parengkuan, F., Masinambow, V. A., & Niode, A. O. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2005-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 61-72.
- Saputera, A. G. E., & Pandoyo, P. (2020). Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 3(2): 17-28.
- Sigalingging, A., & Rijal, R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), DANA Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampush IISIP YAPIS Biak*, 18(1), 29-40.
- Trianto, L., & Panggabean, M. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 21-33.
- Uhise, S. (2013). Dana Alokasi Umum (DAU) pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4): 1677-1686